

Identitas nasional sebagai pondasi : Tinjauan historis dan filosofis

Muhammad Fariz Arrasyid

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110024@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Identitas nasional, politik identitas, polarisasi, demokrasi, etika politik

Keywords:

National identity, identity politics, polarization, democracy, political ethics

ABSTRAK

Identitas nasional bukan sekadar simbol formal yang melekat pada suatu bangsa, melainkan merupakan konstruksi filosofis dan historis yang menopang kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Kajian ini bertujuan menganalisis peran identitas nasional sebagai landasan moral bangsa Indonesia dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Melalui studi literatur terhadap lima sumber ilmiah terpilih, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama: dimensi historis pembentukan identitas nasional, posisi Pancasila sebagai sistem nilai terbuka yang adaptif, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang secara inheren mengandung dimensi moral, spiritual, dan humanistik. Konsep negara integralistik Soepomo, kehendak umum Rousseau, serta gagasan masyarakat madani memperkuat argumen bahwa moralitas publik hanya dapat dibangun ketika identitas kolektif suatu bangsa dipahami secara mendalam dan diinternalisasikan secara aktif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan identitas nasional melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditawar dalam menjaga kohesivitas bangsa di era globalisasi.

ABSTRACT

National identity fundamentally serves as a cohesive force in sustaining unity within Indonesia's pluralistic society. However, in contemporary political practice, its meaning has increasingly been contested and instrumentalized to advance particular group interests. This article aims to examine the tension between the ideal conception of national identity and the political reality characterized by adversarial and delegitimizing practices in Indonesia. This study employs a qualitative method using a literature review approach, drawing upon relevant scholarly journals and academic books. The findings reveal that democratization, while expanding political freedoms, has simultaneously intensified identity-based divisions, particularly along religious and nationalist lines, thereby contributing to heightened social polarization, declining public trust in governmental institutions, and the proliferation of misinformation. Moreover, the prevalence of unethical political communication practices, including excessive personal branding and performative political behavior, further undermines the substantive quality of democratic processes by privileging image over policy discourse. Therefore, this study underscores the necessity of reconstructing an inclusive and substantive understanding of national identity, alongside reinforcing political ethics, in order to ensure the resilience and sustainability of democracy in Indonesia.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman yang luar biasa ratusan suku, ribuan bahasa lokal, serta beragam tradisi budaya dan agama yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di tengah kemajemukan ini, pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyatukan seluruh elemen bangsa selalu menjadi isu sentral dalam wacana kebangsaan. Identitas nasional hadir sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, bukan dalam bentuk keseragaman yang dipaksakan, melainkan sebagai titik temu nilai-nilai bersama yang secara historis tumbuh dari pengalaman panjang perjuangan kemerdekaan, interaksi lintas budaya, dan konsensus filosofis yang kemudian terkristalisasi dalam Pancasila.

Namun, identitas nasional bukanlah entitas yang statis. Ia terus berhadapan dengan dinamika zaman, termasuk tekanan dari arus globalisasi yang membawa serta nilai-nilai asing yang tidak selalu selaras dengan karakter bangsa. Fenomena melemahnya rasa nasionalisme, pudarnya semangat gotong royong, hingga maraknya perilaku individualistis di kalangan generasi muda menjadi indikasi konkret bahwa identitas nasional sedang menghadapi ujian serius (Rahman, 2025). Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah identitas nasional itu penting, melainkan sejauh mana ia mampu berfungsi sebagai fondasi moral yang kokoh ketika bangsa dihadapkan pada berbagai guncangan sosial dan ideologis.

Selain sebagai alat pemersatu, identitas nasional juga berfungsi sebagai pembeda yang menegaskan keunikan suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain. Keunikan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti bahasa, budaya, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya justru menjadi kekuatan yang memperkaya identitas nasional (Faslah, 2024). Keunikan tersebut tidak hanya penting dalam membangun kebanggaan nasional, tetapi juga berperan dalam membentuk citra Indonesia di mata dunia internasional.

Dari perspektif historis, pembentukan identitas nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang menentang kolonialisme. Kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman bersama itu kemudian dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pada titik inilah Pancasila muncul bukan hanya sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai ekspresi filosofis dari nilai-nilai yang hidup dalam tradisi nusantara. Sila sila dalam Pancasila mencerminkan perpaduan antara dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang semuanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh (Ramadhani, 2025).

Dari sisi filosofis, kajian tentang identitas nasional semakin relevan ketika dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran besar dalam tradisi filsafat politik. Konsep negara integralistik yang dikemukakan Soepomo, misalnya, menegaskan bahwa hubungan antara individu dan negara bukan hubungan yang bersifat antagonistik, melainkan organik dan saling melengkapi. Gagasan ini memiliki benang merah yang menarik dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang kehendak umum “*volonté Générale*”, yang menekankan bahwa legitimasi negara hanya bisa hadir ketika ia mencerminkan kepentingan kolektif seluruh warga (Phandino & Riyanto, 2026). Pertemuan dua tradisi pemikiran ini membuka ruang refleksi yang produktif tentang bagaimana moralitas publik dapat dibangun dan dipertahankan di tengah masyarakat yang majemuk.

Kajian ini hadir dengan tujuan untuk menelaah secara sistematis peran identitas nasional sebagai fondasi moral bangsa Indonesia melalui dua lensa utama: historis dan filosofis. Dengan bersandar pada lima sumber ilmiah yang relevan dan mutakhir, tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana identitas nasional bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga instrumen hidup yang perlu terus diperkuat melalui pendidikan, budaya, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pembahasan

Akar Historis Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Identitas nasional tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, identitas nasional menjadi alat pemersatu yang mampu membangun rasa kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya (Faslah, 2024).

Namun, identitas nasional Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang, kompleks, dan penuh perjuangan. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, masyarakat Nusantara telah memiliki beragam identitas lokal dengan bahasa, adat, serta sistem kepercayaan yang berbeda-beda. (Mulyoto, 2021) menjelaskan bahwa identitas nasional terbentuk dari kesadaran bersama untuk bersatu di tengah keberagaman, terutama melalui pengalaman kolektif menghadapi penjajahan, sehingga lahirlah rasa kebangsaan yang menjadi dasar persatuan Indonesia.

Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak paling signifikan dalam proses pembentukan identitas nasional tersebut. Untuk pertama kalinya, berbagai kelompok pemuda dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda sepakat menyatakan diri sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Ikrar ini bukan sekadar deklarasi simbolis; ia mencerminkan transformasi kesadaran kolektif dari identitas kedaerahan menuju identitas kebangsaan yang lebih inklusif (Rahman, 2025). Momentum ini kemudian dilanjutkan dengan perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI 1945, di mana para pendiri bangsa berupaya merumuskan nilai-nilai yang dapat menjadi landasan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan.

Dalam perspektif ini, sejarah berfungsi lebih dari sekadar catatan peristiwa masa lalu. Ia adalah narasi kebangsaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk rasa memiliki “sense of belonging” terhadap bangsa dan negara. Indonesia yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah sangat bergantung pada narasi sejarah bersama ini sebagai perekat kohesi sosial (Rahman, 2025). Tanpa fondasi historis yang kuat, identitas nasional hanya akan menjadi slogan tanpa makna mudah terkikis oleh perubahan zaman dan pengaruh luar.

Namun, warisan historis saja tidak cukup. Sejarah perlu terus dimaknai ulang dalam konteks kekinian agar tetap relevan dan fungsional. Hal inilah yang membuat kajian

tentang identitas nasional selalu bersifat dinamis dan tidak pernah benar-benar selesai. Setiap generasi dituntut untuk memahami sejarah bangsanya, bukan sebagai beban yang harus dipikul, melainkan sebagai modal intelektual dan moral untuk menghadapi tantangan zaman.

Pancasila sebagai Sistem Nilai Terbuka dan Adaptif

Salah satu keistimewaan Pancasila sebagai ideologi bangsa terletak pada sifatnya yang terbuka (*open ideology*). Berbeda dengan ideologi tertutup yang cenderung dogmatis dan menolak perubahan, Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman (Azizurohim., 2026). (Faslah, 2025) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa mengandung prinsip-prinsip universal seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang bersifat permanen, namun implementasinya dalam kebijakan publik, kehidupan sosial, dan pendidikan tetap bersifat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan Pancasila ini menjadikannya bukan sekadar ideologi politik, tetapi sistem nilai yang mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, dan dinamika demokrasi modern. Dalam era globalisasi digital, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keadilan justru semakin relevan ketika dihadapkan pada tantangan seperti disinformasi, polarisasi sosial, dan individualisme berlebihan (Azizurohim., 2026). Pancasila dengan demikian berfungsi sebagai filter ideologis yang tidak serta-merta menolak pengaruh luar, melainkan menyaringnya agar yang diadopsi adalah nilai-nilai yang selaras dengan kepribadian bangsa.

Lebih dari itu, setiap sila dalam Pancasila memiliki dimensi moral yang mendalam. Sila Ketuhanan menegaskan bahwa kehidupan berbangsa harus berlandaskan nilai spiritual dan toleransi antarumat beragama. Sila Kemanusiaan mendorong penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Sila Persatuan mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan bijaksana. Sila Kerakyatan menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Sementara Sila Keadilan Sosial menegaskan komitmen bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata (Ramadhani, 2025). Kelima sila ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat dan membentuk sistem moral yang komprehensif.

Relevansi Pancasila sebagai sistem nilai terbuka juga tampak dalam kemampuannya untuk berdialog dengan pemikiran-pemikiran global tanpa kehilangan akarnya. Nilai gotong royong yang menjadi fondasi budaya Indonesia, misalnya, dapat dimaknai sebagai bentuk konkret dari prinsip solidaritas sosial yang universal. Musyawarah mufakat dapat dipahami sebagai praktik demokrasi deliberatif yang sejalan dengan gagasan-gagasan demokrasi kontemporer. Dengan cara ini, Pancasila bukan hanya ideologi lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi kontribusi intelektual bangsa Indonesia kepada wacana global tentang kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan (Hasan et al., 2025).

Dimensi Filosofis: Dialog antara Integralistik dan Rousseau

Kajian tentang identitas nasional Indonesia tidak akan lengkap tanpa menelaah landasan filosofisnya. Dua tradisi pemikiran yang sangat relevan dalam konteks ini adalah konsep negara integralistik Soepomo dan teori kehendak umum “*Volonté Générale*” Jean-Jacques Rousseau. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda satu dari tradisi Asia pasca kolonial dan satu lagi dari Pencerahan Eropa abad ke-18 keduanya memiliki titik temu yang menarik dalam memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Soepomo memandang negara bukan sebagai institusi yang terpisah dari masyarakat, melainkan sebagai organisme sosial yang hidup dan bernapas bersama rakyatnya. Dalam pandangan integralistik ini, negara adalah wujud dari kesatuan organik antara seluruh elemen bangsa individu menyatu dengan masyarakat, dan masyarakat menyatu dengan negara dalam semangat gotong royong dan harmoni sosial (Phandino & Riyanto, 2026). Konsep ini menolak dua ekstrem: liberalisme yang menempatkan kepentingan individu di atas segalanya, dan totalitarianisme yang menghapus kebebasan personal demi kepentingan negara.

Rousseau, di sisi lain, berpendapat bahwa legitimasi suatu negara hanya dapat bersumber dari kehendak umum kesepakatan moral kolektif yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Melalui kontrak sosial, setiap individu secara sukarela menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada komunitas, dan sebagai gantinya mendapatkan kebebasan moral yang lebih tinggi: kebebasan untuk hidup di bawah hukum yang dibuat bersama (Phandino & Riyanto, 2026). Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan sejati bukan berarti bebas dari segala ikatan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam kerangka hukum yang disepakati secara kolektif.

Ketika dua pemikiran ini dipertemukan, muncul sebuah kerangka filosofis yang kaya tentang bagaimana identitas nasional dapat berfungsi sebagai fondasi moral bangsa. Baik integralistik Soepomo maupun kehendak umum Rousseau sama-sama menolak individualisme atomistik yang memisahkan individu dari komunitasnya. Keduanya meyakini bahwa kebebasan individu hanya memiliki makna ketika diimplementasikan dalam konteks tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, sintesis ini tereksresi dalam Pancasila, khususnya pada sila Keadilan Sosial yang menegaskan bahwa kebebasan individu bermakna hanya jika turut mewujudkan keadilan bagi sesama (Phandino & Riyanto, 2026).

Dialog filosofis ini juga memiliki implikasi praktis yang penting. Dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, perpaduan antara semangat integralistik dan prinsip kehendak umum dapat menjadi dasar untuk membangun model kewarganegaraan yang seimbang: warga negara yang mampu berpikir dan bertindak bebas, namun selalu mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap kesejahteraan bersama. Model kewarganegaraan semacam ini sangat dibutuhkan di tengah era demokrasi partisipatif yang menuntut keterlibatan aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identitas Nasional, Masyarakat Madani, dan Tantangan Globalisasi

Identitas nasional yang kokoh merupakan prasyarat bagi tumbuhnya masyarakat madani yang sehat. Masyarakat madani yang dicirikan oleh penghormatan terhadap hukum, kesederajatan, keterbukaan, dan partisipasi aktif warga tidak mungkin terwujud tanpa adanya nilai-nilai bersama yang menjadi pijakan moral seluruh anggota masyarakat (Rahman et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah nilai-nilai bersama tersebut. Ia menyediakan landasan moral, hukum, dan budaya yang diperlukan agar masyarakat madani dapat berkembang secara organik, bukan sekadar direayasa dari atas.

Namun demikian, perkembangan globalisasi memberikan tantangan yang cukup besar terhadap eksistensi identitas nasional. Arus informasi dan budaya asing yang masuk secara cepat dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi budaya luar tanpa melakukan penyaringan yang tepat. Dampaknya, nilai-nilai budaya lokal mulai terpinggirkan dan rasa nasionalisme mengalami penurunan (Faslah, 2024).

Tantangan ini diperparah oleh kenyataan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari optimal. Banyak warga yang mengenal sila-sila Pancasila secara kognitif, tetapi belum benar-benar menghayati dan mengamalkannya dalam perilaku konkret. Korupsi, intoleransi, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang masih marak terjadi menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara nilai yang diucapkan dan nilai yang dipraktikkan (Ramadhani, 2025). Menutup kesenjangan inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan karakter bangsa.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi instrumen yang strategis dan tidak dapat disubstitusi. Pendidikan semacam ini tidak cukup berhenti pada aspek kognitif sekadar menghafal isi sila-sila Pancasila tetapi harus menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik: menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan mendorong tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Hasan et al., 2025). Keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan misi ini secara sinergis dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kajian ini telah menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia merupakan konstruksi yang secara sekaligus bersifat historis, filosofis, dan moral. Secara historis, identitas nasional terbentuk melalui proses panjang perjuangan kemerdekaan dan interaksi lintas budaya yang menghasilkan kesadaran kolektif tentang kebersamaan sebagai bangsa. Secara filosofis, Pancasila sebagai inti dari identitas nasional memiliki kedalaman reflektif yang mampu berdialog dengan berbagai tradisi pemikiran, baik lokal maupun universal, tanpa kehilangan akar nilainya. Secara moral, Pancasila menyediakan kerangka etika publik yang mengintegrasikan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial dalam satu kesatuan yang koheren.

Dialog antara konsep integralistik Soepomo dan kehendak umum Rousseau memperkaya pemahaman tentang bagaimana negara dapat berfungsi bukan sekadar sebagai alat administratif, melainkan sebagai komunitas moral yang menopang kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. Sementara itu, tantangan globalisasi yang terus mengikis nilai-nilai lokal menegaskan urgensi penguatan identitas nasional sebagai strategi pertahanan budaya yang tidak bisa ditunda.

Daftar Pustaka

- Azizurohim. (2026). Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. 4, 209–214.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., & Putra, M. I. (2025). Relevansi Pancasila Sebagai Dasar Ideologi. 2(6), 287–298.
- Mulyoto, G. P. (2021). Identitas Nasional dalam Karakter Bangsa. <http://repository.uin-malang.ac.id/10835/>
- Phandino, T. D., & Riyanto, A. (2026). <https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik> Integralistik Indonesia Dan Tantangan Identitas Nasional Dalam Dialog Dengan Pemikiran Rousseau 1,2. 37, 80–92.
- Rahman, A. (2025). Identitas Nasional dan Masyarakat Madani: Fondasi Kekuatan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. 1(3), 567–578.
- Ramadhani, R. nabillah. (2025). Identitas nasional: Pancasila pengembangan karakter bangsa dalam rangka. 3, 1794–1800.